



## PENDAHULUAN

Bogor memiliki latar sejarah yang amat panjang. Hal itu didasarkan pada temuan data arkeologi dan historis bahwa wilayah geografis itu pada masa-masa sebelumnya merupakan tempat berdirinya kerajaan yang terbilang besar. Kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan Tarumanegara (abad IV-VII), kerajaan Sunda (abad VII-XI), dan kerajaan Pakuan Pajajaran (abad XV-XVI).<sup>1)</sup>

Rangkaian peristiwa kesejarahan, antara zaman Tarumanagara hingga masa Pakuan Pajajaran menunjukkan adanya keterkaitan yang erat serta mata rantai historis yang berkesinambungan. Namun, setelah Pajajaran runtuh (1579), terkesan "sirna" pulalah masyarakatnya, sehingga kesinambungan sejarah pun "terputus". Kota itu ditemukan kembali sebagai "puing" yang diselimuti hutan tua oleh ekspedisi yang dilakukan VOC. Ekspedisi itu berturut-turut dipimpin oleh Scipic (1887), Adolf Winkler (1890), dan Abraham van Riebeck (1703, 1704, 1709).<sup>2)</sup> Berkat ekspedisi itu, kota yang hilang hampir seabad lamanya mulai "bertunas" kembali menunjukkan ciri-ciri kehidupan.

Dalam ekspedisi itu disertakan pasukan pekerja (*werktroep*) Kompeni di bawah pimpinan Letnan Tanujiwa yang diberi tugas membuka daerah pedalaman dan perladangan. Tanujiwa bersama pasukannya mendirikan Kampung Baru dan kampung-kampung lainnya. Kampung Baru, tempat kedudukan Tanujiwa, pada awalnya merupakan "pusat pemerintahan" bagi kampung-kampung lainnya, kemudian pada tahun 1745 resmi menjadi kabupaten di bawah pimpinan seorang bupati dengan gelar *demang*.<sup>3)</sup>

Eksistensi Kampung Baru semakin mendapat arti setelah Gubernur Jenderal Gustaaf van Imhoff (1743-1750) mendirikan tempat peristirahatan di sana. Ia memilih tempat di daerah itu dengan pertimbangan basis ekologisnya yang sangat kondusif; pemandangan alam yang indah, tanah yang subur, iklim yang sejuk, serta letak geografis yang strategis. Gedung yang dibangun sebagai tempat peristirahatan serta pertanian dan lingkungan di seputarnya oleh van Imhoff diberi nama "Buitenzorg", yang secara harfiah berarti "tanpa urusan". Nama Bogor sendiri pada waktu itu hanyalah sebuah kampung yang letaknya berdekatan dengan Buitenzorg-nya van Imhoff.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama kampung Baru semakin terdesak oleh kepopuleran nama Buitenzorg, sampai akhirnya nama kabupaten pun diganti dengan nama kabupaten Buitenzorg pada tahun 1873. Pada sisi lain, tempat peristirahatan Buitenzorg pun mengalami perkembangan, baik dari segi fisiknya maupun fungsinya. Dari segi fisik, gedung yang didirikan van Imhoff itu diperluas oleh Daendels (1809) dan dibangun kembali oleh van der Capellen (1819). Dari segi fungsinya, bangunan yang semula hanya sebagai tempat peristirahatan sejak masa Daendels dijadikan tempat kegiatan resmi Gubernur Jenderal. Bahkan selanjutnya kegiatan administrasi pemerintah pusat pun berpindah pula dari Batavia ke Buitenzorg dengan dibangunnya gedung *Algemeene Secretarie*.

Dengan dibentuknya Departemen Pendidikan, Departemen Pertanian, Kebun Raya, Kebun percobaan (*Culturtuin*), dan fasilitas-fasilitas lainnya di daerah seputar Buitenzorg pada paruh pertama abad ke-19, ke semua itu telah mencuatkan eksistensi Buitenzorg sebagai kota yang memiliki arti penting dan strategis. Ditambah lagi dengan dibukanya jalur kereta api Buitenzorg-Batavia (1873) dan Buitenzorg dengan kabupaten-kabupaten di Priangan memungkinkan Buitenzorg menjadi daerah yang semakin terbuka, yang pada gilirannya telah mendorong terjadinya dinamika dan mobilitas sosial-ekonomi yang tinggi.<sup>4)</sup>

Perkembangan kota yang semakin pesat ditandai dengan heterogenitas penduduk, keragaman budaya, kompleksitas organisasi sosial dan ekonomi, serta ekologi sosial lainnya, yang kemudian berpengaruh pula terhadap perkembangan struktur fisik kota, tataruang dan tataguna tanah, serta pengadaan berbagai sarana dan fasilitas kota. Kehadiran orang-orang Eropa yang semakin meningkat pada paruh kedua abad ke-19, baik sebagai pejabat di pemerintah maupun sebagai pengusaha, telah memberi warna terhadap wajah perkotaan. Perkembangan seperti itu telah memungkinkan kota Buitenzorg mendapat status administrasi sebagai *gemeente* (1905) dan *stadsgemeente* (1926).

Dari latar belakang itu banyak hal yang bisa dilihat. Namun, pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini diarahkan pada rumusan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana keadaan kota Bogor pada masa awal pembentukannya; *kedua*, bagaimana perkembangan kota Bogor pada masa kolonial; *ketiga*, bagaimana perubahan-perubahan terjadi dan faktor-faktor apa yang turut berperan dalam proses perubahan itu; dan *keempat*, bagaimana hubungan perkembangan masyarakat terhadap struktur ekologi kota serta bagaimana menyerasikan kedua perkembangan itu.

Mengingat kompleksitas aspek yang dicakup oleh fenomena kota (aspek demografis, morfologis, sosiologis, historis, ekonomi, administratif, dan sebagainya), maka untuk mengungkap masalah itu digunakan konsep pokok yakni konsep ekologi atau morfologi. Dengan menggunakan konsep itu diharapkan berbagai aspek yang melekat pada kota dapat dikaji.

Konsep ekologi kota mengacu pada pemahanan "interaksi antara manusia dan alam sekitarnya". Perubahan ekologi akan terjadi bila salah satu dari komponen itu mengalami perubahan. Wujud konkret dari interaksi itu tampak dalam bentuk fisik kota, struktur sosialnya, organisasi sosial-ekonominya, dan sebagainya.<sup>5)</sup> Adapun konsep morfologi sosial mengandung pengertian "hubungan antara struktur sosial dan lingkungan fisik serta bentuk material dari struktur sosial suatu masyarakat di dalam lingkungan fisik tertentu".<sup>6)</sup>

Untuk mendukung penerapan konsep ekologi kota, kiranya perlu juga dipahami mengenai prakondisi munculnya kota, konsep-konsep mengenai kota tradisional/praindustri dan kota kolonial, serta perubahan-perubahan sosial yang menyertai perkembangan kota.

Pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis dimaksudkan melihat perubahan-perubahan dari segi prosesualnya atau dinamikanya. Pendekatan sosiologis berarti digunakannya pendekatan struktural, dengan fokus pandangan yang menganggap struktur sebagai inti perubahan. Hal ini mengandung konsekuensi digunakannya teori-teori ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi, antropologi, dan politikologi.

## CARA PENELITIAN

Dalam menggarap penelitian ini dilakukan empat tahapan kerja, pertama *heuristik* yakni mencari dan mengumpulkan sumber. Kedua, *kritik*, menyeleksi sumber, baik dari segi otentisitasnya maupun kredibilitasnya. Ketiga, *interpretasi* menafsirkan dan memberi makna terhadap sumber yang terseleksi. Keempat, *historiografi* yakni penulisan sejarah sebagai kisah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Bogor pada awalnya termasuk dalam lingkup kerajaan Pajajaran, bahkan di tempat itulah letaknya ibukota kerajaan. Pada masa ibukota kerajaan dibumihanguskan pasukan Banten (1578), disebutkan bahwa seluruh ibukota kerajaan dihancurkan dan penduduknya dibunuh atau diusir. Dengan demikian, dapatlah diperkirakan penduduk kota itu amat berkurang dan terpecah, walaupun bukan kosong sama sekali.<sup>7</sup>

Pada waktu Mataram mengembangkan politik ekspansinya ke wilayah Priangan pada tahun 1620-an, sementara Banten tidak mempedulikan daerah yang telah ditaklukkannya, kemungkinan besar wilayah bekas ibukota Pajajaran itu berada dalam bayangan kekuasaan Mataram. Pada periode ini tidak diketahui mengenai penduduk di wilayah itu. Petunjuk awal mengenainya mulai tampak di seputar peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia (1628-1629). Kegagalan serangan Mataram ke Batavia membuat Ukur dan Sumedang (di Priangan), yang juga turut dilibatkan dalam membantu serangan itu, mengendorong kesetiannya kepada Mataram, bahkan ada yang pemberontak. Untuk menghindari hukuman Mataram atas pemberontakan itu, sekitar 8 sampai 10 ribu orang mengajukan permohonan kepada pemerintah tinggi VOC supaya diperbolehkan bermukim di sekitar Batavia di bawah perlindungan Kompeni. Hal yang sama diajukan pula kepada Banten<sup>8</sup>. Permohonan itu rupanya dikabulkan, dan mereka kemungkinan besar tinggal di antara Batavia dan Banten, yaitu di daerah-daerah sekitar bekas ibukota kerajaan Pajajaran.

Begitu pula halnya dengan pasukan Mataram, kegagalan serangan atas Batavia membuat sebagian di antara mereka enggan kembali ke tempat asal, karena takut akan ancaman hukuman dari penguasa Mataram. Mereka melarikan diri ke daerah-daerah pedalaman Batavia, di daerah sekitar bekas ibukota Pajajaran.

Pada saat kekuasaan Mataram atas Priangan lepas ke tangan VOC (1705) serta kemerdekaan Banten berakhir (1695) dan berada di bawah kontrol VOC, wilayah bekas ibukota Pajajaran termasuk dalam pengawasan kekuasaan VOC. Sejak periode inilah wilayah itu mulai terbuka sebagai pemukiman resmi. Puing-puing kehidupan bertunas kembali, penduduk bertambah, tempat-tempat pemukiman serta perkampungan bermunculan, dan organisasi kekuasaan yang mencerminkan kebijakan VOC diberlakukan. Hal itu dimungkinkan berkat ekspedisi yang berturut-turut dilakukan oleh tiga ekspedisi VOC yang dipimpin oleh Scipio (1687), Adolf Winkler (1690), dan Araham van Riebeck (1703, 1704, 1709).

Dari ketiga ekspedisi itu terdapat persamaan dalam hal tidak ditemukannya pemukiman di bekas ibukota kerajaan kecuali di beberapa tempat yang dilaluinya, seperti Cikeas, Citeureup, Kedung Halang, dan Parung Angsana. Beberapa penghuni liar ditemukan juga di daerah aliran Ciliwung antara Kedung Badak sampai Muara Beres. Mereka adalah sisa-sisa lasykar Mataram yang tidak mau kembali ke daerah asalnya setelah gagal menyerang Batavia.<sup>9)</sup>

Anggota ekspedisi itu mendirikan beberapa perkampungan yaitu: Kampung Baru, Parakang Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantar Jati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng, dan Cimahpar. Pada awalnya Kampung Baru dijadikan semacam "pusat pemerintahan" bagi kampung-kampung lainnya, sampai akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1745.<sup>10)</sup>

Pada sisi lain, di kabupaten Kanjung Baru terjadi perkembangan penting setelah Gubernur Jenderal van Imhoff mendirikan tempat peristirahatan di wilayah itu yang diberinya nama Buitenzorg. Perkembangan Buitenzorg semakin mendapat arti setelah terjadinya beberapa perubahan. Berpindahanya lokasi kabupaten Kampung Baru ke daerah yang termasuk kawasan Buitenzorg serta berkembangnya fungsi Buitenzorg menjadi tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal dan sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial menjadi faktor penarik terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota.

Berkembangnya fungsi kota Buitenzorg sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal dan pusat administrasi pemerintahan kolonial seakan menjadi magnet yang memacu perkembangan kota. Divisi-divisi administrasi pemerintah didirikan, aktivitas perekonomian meningkat, pusat-pusat pelayanan umum diadakan, sarana dan fasilitas-fasilitas hidup disediakan.

Kedatangan orang-orang Eropa yang semakin meningkat pada paruh kedua abad ke-19 sebagai akibat dari politik ekonomi liberal telah turut mempengaruhi struktur ekologi kota, lebih-lebih dengan kehadiran para wanita Eropa yang turut serta bersama suami mereka. Berbeda dengan kaum prianya, para wanita Eropa kurang adaptif terhadap lingkungan yang sama sekali baru. Mereka menuntut dibentuknya model kehidupan seperti halnya yang pernah mereka alami di negaranya; seperti bentuk rumah dan lingkungannya, pendidikan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Dengan

demikian, terciptalah ekologi perkotaan yang meniru model Eropa.<sup>11)</sup>

Penduduk Buitenzorg pada awal abad ke-19 sudah menunjukkan ciri-ciri heterogen. Secara garis besar, terdapat dua kelompok masyarakat di Buitenzorg, masyarakat pribumi dan masyarakat asing.

Meskipun Buitenzorg secara etnis-kultural berada dalam ruang sosial masyarakat Sunda, dalam kenyataannya masyarakat pribumi yang ada di sana terdiri dari berbagai unsur. Pertama-tama adalah, tentu saja, penduduk asli Buitenzorg. Mereka merupakan keturunan rakyat Pajajaran yang berhasil lolos dan menyelamatkan diri dari serangan Banten. Unsur selanjutnya adalah penduduk yang berasal dari Banten, Priangan, Mataram, dan Batavia.<sup>12)</sup>

Beragamnya unsur etnis masyarakat pribumi di Buitenzorg pada gilirannya memunculkan pula keragaman budaya yang tampak dalam *performance*-nya. Masing-masing unsur memiliki karakter menonjol, yang dalam beberapa hal tampak dipertahankan dan merupakan kebanggaan komunitas masing-masing. Dialek bahasa, bentuk rumah, dan lumbung menunjukkan perbedaan yang menonjol dari tiap-tiap etnis.<sup>13)</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, akibat dari kontak budaya yang kian intensif antarkelompok etnis, melalui organisasi sosial dan ekonomi, maka karakter khas dan kefanatikan terhadap unsur budaya asal terus melonggar. Masing-masing kelompok menunjukkan sikap moderasinya untuk mengakomodasikan setiap perbedaan; mereka saling memberi dan menerima sesuatu yang berasal dari luar kelompoknya, sehingga mengarah ke terciptanya suatu model baru.

Adapun penduduk asing yang ada di Buitenzorg terdiri atas tiga kelompok yaitu orang Eropa, Cina, dan Arab.

Pada paruh kedua abad ke-19 banyak imigran asing yang menetap di Buitenzorg dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ketika migrasi karena perdagangan semata-mata. Para pendatang itu membentuk keluarga, sehingga tingkat pertumbuhan mereka lebih besar dibandingkan dengan pendatang asing lainnya yang tidak menetap.<sup>14)</sup>

Orang Eropa sebagian besar tinggal di ibukota dan sebagian lainnya tinggal tersebar di beberapa tanah perkebunan dan tanah *erfpacht* (hak guna usaha). Orang Eropa pun banyak tinggal di distrik Parung sehubungan dengan adanya masyarakat Kristen di Depok. Orang Cina dalam jumlah besar tinggal di ibukota, sebagian yang lain tinggal secara berkelompok di beberapa desa, dan sebagian lain lagi berbaur dengan masyarakat pribumi. Adapun orang Arab tinggal di ibukota.

Kondisi perekonomian di Buitenzorg secara kategoris, meminjam istilah yang digunakan Clifford Geertz, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, perekonomian tipe pasar dan perekonomian tipe firma.<sup>15)</sup> Yang mendasari perbedaan itu ialah sifat dualisme masyarakat, masyarakat yang berkarakter pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan, yang keterikatannya pada faktor alam sangat kuat, berkecenderungan untuk mempraktekkan perekonomian tipe pertama,

sedangkan pada masyarakat perkotaan cenderung pada tipe yang kedua.

Karakteristik perekonomian tipe pertama, selain terbatasnya permodalan, juga, yang penting, lemahnya sistem organisasi dan manajemen, mengabaikan faktor-faktor rasionalitas dan efisiensi, serta terkesan "*non-profit oriented*". Pada tipe yang kedua, meskipun permodalan masih juga merupakan hal yang problematik, namun kekuatan tipe ini lebih terletak pada dukungan infrastruktur yang kuat, organisasi dan manajemen yang solid, rasional, efisien, dan berorientasi jauh ke depan. Sifat dualistik dari masyarakat itu, pada gilirannya, berpengaruh pula pada tipologi lembaga moneter yang ada yang mendukung usaha perekonomian masyarakat.<sup>16</sup>

Bila didasarkan pada kriteria pemilikan tanah, maka akan ditemukan tiga penggolongan masyarakat desa, yaitu petani kaya dan miskin, sedangkan lapisan tengahnya terdiri atas pengrajin, tukang, pedagang atau penjaja. Bila didasarkan pada derajat afinitasnya dengan struktur birokrasi pemerintah, akan dijumpai struktur sosial sebagai berikut: pertama, kelas penguasa atau ningrat; kedua, kelas mantri atau pejabat tinggi; ketiga, kelas abdi *dalem* yaitu pejabat rendah dan pejabat desa. Dengan demikian, secara keseluruhan, masyarakat Buitenzorg terdiri atas dua lapisan utama, yaitu kelas penguasa dan kelas petani dengan hierarkhinya masing-masing. Di antara dua kelas itu terdapat kelompok menengah yang terdiri atas kaum pengusaha, intelektual, dan elit agama independen.<sup>17</sup> Meskipun secara kuantitatif jumlah kelompok menengah itu jauh lebih kecil, namun mereka mempunyai posisi sosial, ekonomi, dan politik tersendiri yang memiliki kekuatan tawar-menawar (*bargainine power*) yang diperhitungkan.

Bila dilihat dari struktur okupasi masyarakatnya, maka akan ditemukan mereka yang bekerja di bidang pertanian, pegawai pemerintah, pegawai perusahaan swasta, perdagangan, sektor informal, dan berbagai sektor jasa lainnya.

Pembagian wilayah administrasi Buitenzorg pada masa kolonial Belanda mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini diselingkan dengan sistem perundang-undangan yang berlaku pada tingkat makro dan berbagai kebijakan khusus lain yang berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial.

Sebelum tahun 1866, *afdeling* Buitenzorg terdiri atas satu kabupaten (*regentschap*) dan empat kademangan (*de mangschap*), yaitu kabupaten Buitenzorg, kademangan Parung, Cibarusa, Cibinong, dan Jasinga.<sup>18</sup> Pada tahun 1866 terjadi reformasi dalam pembagian wilayah administrasi yaitu berubahnya status empat kademangan menjadi distrik dan penambahan dua distrik, sehingga *afdeling* Buitenzorg itu terdiri atas satu kabupaten yang membawahi enam distrik. Keenam distrik itu ialah distrik Buitenzorg, Parung, Jasinga, Cibinong, Cibarusa, dan Leuwiliang.<sup>19</sup> Pada tahun 1921, jumlah distrik ditambah lagi satu-pemekaran distrik Buitenzorg yang dianggap terlalu luas-yaitu distrik Ciawi.<sup>20</sup> Masing-masing distrik membawahi beberapa onderdistrik.

Perkembangan administrasi pemerintahan kota terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Kenyataan itu dimungkinkan sebagai akibat dihapuskannya sistem Tanam Paksa dan pembukaan Hindia Belanda untuk perusahaan swasta, yang pada gilirannya, kehadiran orang-orang Eropa, dengan semangat *entrepreneurial*-nya, masuk ke wilayah Buitenzorg semakin meningkat. Keadaan orang-orang Eropa di wilayah ini, pada perkembangan selanjutnya, menuntut diberlakukannya sistem dan disediakannya berbagai fasilitas seperti halnya yang pernah mereka miliki di negerinya sendiri. Tuntutan mereka itu — yang pada sisi tertentu berseiringan dengan program kesejahteraan bagi orang pribumi melalui Politik Etis (1901) — menghasilkan sikap-sikap baru yang signifikan dalam bidang administrasi, program-program teknis dan kesejahteraan, departemen-departemen baru dalam pemerintahan, serta pembaharuan legislatif.<sup>21)</sup>

Salah satu hasil nyata, sebagai jawaban atas tuntutan mereka, adalah dibentuknya undang-undang Desentralisasi (1903) yang memungkinkan pembentukan kota-kota yang lebih besar menjadi *gemeente* dengan tingkat otonomi yang terbatas dan pembentukan *gemennteraad* (dewan legislatif *gemeente*).<sup>22)</sup> Spesifikasi yang disebutkan dalam legislasi itu adalah bahwa *gemeente* hanya meliputi wilayah kota dan dewannya harus selalu beranggotakan mayoritas orang Eropa yang ditunjuk serta sedikit orang pribumi dan Timur Asing yang juga ditunjuk. *Gemeente* juga memiliki hak untuk meningkatkan dan mengatur keuangan sendiri, menyelesaikan urusan publik rumah tangga sendiri, serta menetapkan dan membuat batas-batas baru.

Kondisi yang demikian itu mengisyaratkan bahwa status *gemeente* pada periode kolonial identik dengan daerah kantong Eropa (*European Enclave*) yang ditandai oleh beragam aktivitas komersial Eropa, gaya hidup Eropa, kelembagaan dan perundang-undangan Eropa. Meskipun demikian, sebenarnya di dalam kota itu unsur bangsa pribumi selalu menunjukkan mayoritas, sedangkan orang Eropa dan Timur Asing (khususnya Cina dan Arab) tidak lebih dari sepuluh persen penduduk kota.<sup>23)</sup>

Buitenzorg menjadi *gemeente* pada tahun 1905. Untuk sementara yang diangkat sebagai ketua (*voorzitter gemeente*) adalah asisten residen afdeling Buitenzorg. Meskipun secara teoretis ketua *gemeente* yang dipegang oleh *bureereester* diberlakukan pada tahun 1916, namun di Buitenzorg pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 1920. Jabatan *burgermeester* di *gemeente* Buitenzorg pada tahun itu dipegang oleh ketua *gemennteraad* (dewan *gemeente*).<sup>24)</sup>

Derajat otonomi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, *gemeente* dianggap masih terbatas. Untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan otonomi tersebut, disusunlah *Bestuurhervormingswet* pada tahun 1922.<sup>24)</sup> Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah *gemeente* diberi kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintahan pusat melalui asas dekonsentrasi dan mengembangkan otoritas yang lebih besar.

Menindaklanjuti undang-undang itu, disusunlah *Indische*



*Staatsregeling* pada tahun 1925. Berdasarkan peraturan ini, melalui *Instellings Besluit (Staatsblad 1925 No. 378)*, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1926, terjadi beberapa perubahan administratif. Perubahan status administrasi Buitenzorg berdasarkan keputusan itu adalah sebagai berikut: pertama, yang semula Buitenzorg merupakan afdeling dari keresidenan Batavia, menjadi keresidenan tersendiri yaitu keresidenan Buitenzorg yang membawahi tiga kabupaten: Buitenzorg, Sukabumi, dan Cianjur. Kedua, status *gemeente* berubah menjadi *stadsgemeente* Buitenzorg. Ketiga, kelembagaan di *stadsgemeente* pun ditambah dengan dibentuknya dewan pengurus eksekutif (*college van wethouders*) untuk melengkapi dewan legislatif yang telah ada.

Kota Buitenzorg dengan status *stadsgemeente* itu senantiasa dihubungkan dengan keberadaannya sebagai ibukota atau tempat kedudukan divisi-divisi administratif dan perkembangan komersial orang-orang Eropa. Kota ini pun selalu dikaitkan dengan tempat untuk pemrosesan hasil tanaman, menyokong pusat-pusat kegiatan orang-orang Kristen, eksploitasi sumber alam, pembentukan pusat militer, tempat terdapatnya stasiun kereta api dan jalan-jalan raya, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas pelayanan publik, tempat pendidikan menengah dan tinggi, tempat pengadilan, rumah sakit, dan tempat bagi orang-orang Eropa menghabiskan liburannya dengan mendatangi tempat yang indah, bersih, dan nyaman.<sup>26)</sup>

Identifikasi kota dengan aspek-aspek komersial dan pelayanan publik itu hanya lebih berarti bagi orang-orang Eropa dan Cina, karena kedua kelompok ini terlibat dalam aktivitas kota dan mereka menikmati hasilnya. Kurangnya sumber-sumber ekonomi yang cukup dan terdapatnya diskriminasi sosial telah menjauhkan mayoritas orang pribumi untuk turut menikmati fasilitas-fasilitas publik kota.

Dengan demikian, konsepsi kota pada periode kolonial selalu dihubungkan dengan eksistensi terkonsentrasinya orang-orang Eropa dengan berbagai aktivitasnya, status administrasinya sebagai kotapraja, fungsi administrasi pemerintahannya, dan kemampuannya untuk mengatur keuangan sendiri atau pelayanan publik.

Pada periode awal setelah kemerdekaan, pembagian wilayah administrasi tidak mengalami banyak perubahan. Dalam Undang-undang No. 1/1945, misalnya, yang menyangkut status administrasi Bogor, ditetapkan bahwa Bogor merupakan satu di antara lima kota otonom di Propinsi Jawa Barat, juga sebagai keresidenan dan kabupaten. Demikian juga dalam Undang-undang No. 22/1948 dan Undang-undang No. 11/ 1950 tentang Pemerintah Daerah, status administrasi

Bogor sama seperti sebelumnya. Sedikit perubahan terjadi pada tahun 1950 melalui Undang-undang No. 16/1950, kota Bogor ditetapkan sebagai *Kota Besar*. Mulai tahun 1958 sampai tahun 1964 status kota Bogor berubah menjadi *Kotapraja*, dan sejak tahun 1965 berubah lagi menjadi *Kotamadya* hingga sekarang.<sup>27)</sup>

Perkembangan kota Bogor pada periode-periode berikutnya ditandai oleh semakin tingginya tingkat urbanisasi *the level of urbaniza-*

tion)<sup>27</sup> yang disebabkan oleh derasnya arus migrasi masuk (*in-migration*) dan faktor-faktor alamiah lain. Bila pada tahun 1950 hanya 17% dari jumlah penduduk bertempat tinggal di kota, maka pada tahun 1970 bertambah menjadi 24,7%, dan pada tahun 1990 tingkat urbanisasi bertambah lagi menjadi 37%.<sup>29</sup> Kenyataan itu telah menyebabkan kepadatan penduduk kota melampaui ambang batas ideal. Hal itu pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pemukiman, pertanian, lapangan kerja, keamanan, serta semakin terbatasnya kemampuan fasilitas-fasilitas kota dan pelayanan publik lainnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Akibatnya adalah selain maksimasi fungsi kota tidak bisa dicapai, keserasian ekologi kota pun terganggu.

Selain itu, kota Bogor pun harus memikul beban dari kepesatan perkembangan kota metropolitan Jakarta. Sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Studi Jabotabek, kota Bogor sebagai *countryside* wilayah ibukota negara harus mampu mengimbangi dan menjadi *counter-magnet* terhadap perkembangan kota Jakarta.<sup>30</sup>

Pemecahan yang diambil untuk mengantisipasi kecenderungan itu adalah memperluas wilayah kota, mendistribusikan beberapa pusat kesibukan berintensitas tinggi ke beberapa daerah pingiran kota secara seimbang, relokasi pusat-pusat kegiatan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekologi kota, menambah dan meningkatkan fasilitas kota serta pelayanan umum di beberapa daerah sehingga tidak terkonsentrasi di pusat kota. Guna menjaga keserasian ekologis serta memelihara citra historis kota, semua upaya itu diarahkan ke terciptanya kota dalam tanam.

## KESIMPULAN

Keberadaan kota Bogor pada masa awal pembentukannya lebih merupakan tempat pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi lokal. Pada masa kolonial kota Bogor berkembang pesat dengan diferensiasi fungsinya. Di samping sebagai pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi regional, kota Bogor pun berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan pusat, kota pendidikan dan penelitian, kota pariwisata, dan kota tempat kediaman resmi gubernur jenderal. Perkembangan fungsi kota itu dimungkinkan karena dalam banyak hal Bogor memiliki potensi yang sangat besar dan strategi, juga banyaknya orang Eropa yang tinggal di sana baik sebagai pegawai pemerintah maupun sebagai pengusaha. Hal yang terakhir ini, pada gilirannya, sangat mempengaruhi struktur ekologi kota yang mencerminkan karakteristik kota kolonial.

Pada sisi lain, perkembangan kota berpengaruh juga terhadap masyarakat pribumi. Selain terjadinya arus urbanisasi, juga dalam batas-batas tertentu sebagian masyarakat pribumi dapat turut serta memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota, seperti pendidikan, kesehatan, sektor jasa, dan organisasi sosial-ekonomi kota. Kenyataan itu telah memberi peluang ke arah terjadinya mobilitas sosial penduduk pribumi, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Arsip, Leksikografi, dan Lembaran Negara

*Algemeen Verslag der Assistent Resident Buitenzorg over het Jaar 1834*

"Buitenzorg", *ENI*. Eerste Deel. 1917. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

"Buitenzorg", *ENI* Vijfde Deel. 1927. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

*Memorie van Overgave Resident Buitenzorgs*, L.G.C.A. van der Hoek, 26 October 1931.

*Staatsblad van Nedelands-Indie*, 1903, No. 329.

*Staatsblad van Nedelands-Indie*, 1905, No. 81.

*Staatsblad van Nedelands-Indie*, 1913, No. 329.

### 2. Buku dan Artikel

Asmar, Teguh et al. 1975. *Sejarah Jawa Barat; dari Masa Pra-Sejarah hingga Masa Penyebaran Islam*. Bandung: Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat.

Creutsberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen (peny.). 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Terjemahan Kustiniyati Mochtar dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Danasasmita, Saleh. 1983. *Sejarah Bogor*. Bogor: Pemerintah Daerah Kotamadya D.T. II Bogor.

de Graaf, H.J. 1986. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Terjemahan Pustaka Grafitti Pers dan KITLV. Jakarta: Grafitti Pers.

de Haan, F. 1911. *Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Tweede Deel. Batavia: G. Kolff & Co.

Djajasoempena, Raden Nana. 1974. *Perkembangan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jawa Barat*. Bandung: Direktorat Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Faes, J. 1902. *Geschiedenis van Buitenzorg*. Batavia: Albrecht & Co.

Geertz, Clifford. 1977. *Penjaja dan Raja; Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Terjemahan S. Supomo. Jakarta: Gramedia.

Giebels, Lambert J. "Jabotabek; An Indonesian-Dutch Concept on Metropolitan Planning of the Jakarta-Region", dalam Peter J.M. Nas (ed.) 1986. *The Indonesian City; Studies in urban Development and Planning*. Dordrecht-Holland: Foris Publications, 101-115.

Giebels, Lambert J. "Jabotabek; An Indonesian-Dutch Concept on Metropolitan Planning of the Jakarta-Regional", dalam Peter J.M. Nas (ed.) 1986. *The Indonesian City; Studies in urban Development and Planning*. Dordrecht-Holland: Foris Publications, 101-115.

- Kartodirdjo, Sartono (ed.). 1977. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Kuntowijoyo, "Kota sebagai Bidang Kajian Sejarah". *Paper* Disampaikan dalam Seminar Sejarah Lokal (Proyek IDSN) di Denpasar (1-5 September 1982): 1-14.
- , 1994. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- McGee, T.G. 1971. *The Urbanization Process in the Third World; Explorations in Search of a Theory* London: G. Bell and Sons. Ltd.
- Milone, Pauline D. 1966. *Urban Areas in Indonesia; Administrative and Census Concepts*. Research Series, No. 10 Berkeley: Institute of International Studies University of California.
- Nas, Peter J.M. (ed.). 1986. *The Indonesian City; Studies in Urban Development and Planning*. Dodrecht-Holland: Foris Publications.
- Riesz, C.H.F. 1864. *De Heerendiensten op de particuliere Landen, en de Geschiedenis van Buitenzorg*. 's-Gravenhage: H.C. Susan.
- Sumadio, Bambang (ed.), "Jaman Kuno" dalam Kartodirdjo, Sartono et al. 1975. *Sejarah Nasional II*. Jakarta: Departemen Pendidikandan Kebudayaan.
- The, Siaus Giap. 1959. "Urbanisatie Problemen in Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. 115,3.
- Tideman, J. 1933. "De Bevolking van de Regentschappen Batavia, Meester-Cornelis, en Buitenzorg", *Encyclopaedischbureau van de Koninklijke Vereeniging "Koloniaal Instituut; Het Koloniaal Tijdschrift* (Maart).
- Tjahjati S., Budhy dan Imron Bulkin. 1994. "Arah Kebijaksanaan Tata Ruang Nasional; Studi Kasus Jabotabek", *Prisma*, No. 2, Tahun XXIII, Februari: 21-39.
- Vlekke, Bernard H.M. 1961. *Nusantara: A History of Indonesia*. Brussels: A. Manteau.

## CATATAN KAKI

<sup>1)</sup>Periksa Teguh Asmar et al., *Sejarah Jawa Barat; dari Masa Penyebaran Islam* (Bandung: Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, 1975), hal. 24-80; Sumadio, Bambang (ed.), "Jaman Kuno" dalam Sartono Kartodirdjo et al., *Sejarah Nasional Indonesia II* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 209-244.

<sup>2)</sup>F. de Haan, *Priangan; de Preancer-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1881, Tweede Deel* (Batavia: G. Kolff & Co., 1911), hal. 127-320.

<sup>3)</sup>J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Batavia: Albrecht & Co., 1902), hal. 4.

<sup>4)</sup>"Buitenzorg", *Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie, Eerste Deel* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917), hal. 419-420; Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia* (Brussels: A Manteau, 1961), hal. 276.

<sup>5</sup>Kuntowijoyo, "Kota sebagai Bidang Kafian Sejarah" Paper Disampaikan dalam Seminar Sejarah Lokal (Proyek IDSN) di Denpasar (1-5 September 1982), hal. 5; Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hal. 7-8.

<sup>6</sup>P.J.H. Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979), hal. 25-26).

<sup>7</sup>J. Faes, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>8</sup>H.J. de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hal. 200.

<sup>9</sup>C.H.F. Riesz, *De Heerendiensten op de Particuliere Landen en de Geschiedenis van Buitenzorg* ('s-Gravenhage: H.C. Susan, 1864, hal. 1-2)

<sup>10</sup>Saleh Dasasmita, *Sejarah* (Bogor: Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, 1983), hal. 83.

<sup>11</sup>Peter J.M. Nas, "Introduction; A General View on the Indonesia Town" dalam Peter J.M. Nas, (ed.) *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning* (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1986), hal. 7.

<sup>12</sup>J. Tideman, "De Bevolking van de Regentschappen Batavia, Meester-Cornelis, en Buitenzorg", *Encyclopaedischbureau van de Kominklijke Vereeniging "Koloniaal Instituut"; Het Koloniaal Tijdschrift* (Maart, 1933), hal. 10-11.

<sup>13</sup>*Memorie van Overgave Resident van Buitenzorg*, L.G.C.A. van der Hoek (26 October 1931).

<sup>14</sup>Cf. Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (peny.), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal. 34-35.

<sup>15</sup>Periksa Clifford Geertz, *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomis di Dua Kota*. (Jakarta: Gramedia, 1977).

<sup>16</sup>Lebih lanjut periksa T.G. McGee, *The Urbanization Process in The Third World; Explorations in Search of a Theory* (London: G. Bell and Sons, Ltd., 1971), hal. 64-94.

<sup>17</sup>Untuk perbandingan, periksa Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hal. 61-66.

<sup>18</sup>*Algemeen Verslag der Assistent Resident Bustenzorg over het Jaar 1834*.

<sup>19</sup>"Buitenzorg", *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Eerste Deel. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917), hal. 419.

<sup>20</sup>"Buitenzorg", *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Vijfde deel, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927), hal. 126.

<sup>21</sup>Pauline D. Milone, *Urban Arena in Indonesia; Administrative and Census Concepts* (Berkeley: Institute of International Studies University

of California, 1968), hal. 18.

<sup>22)</sup>*Staatsblad* 1905 No. 137 dan *Staatsblad* 1905 No. 81.

<sup>23)</sup>Pauline D. Milone, *op. cit.*, hal. 19.

<sup>24)</sup>"Buitenzorg" (1927), *op. cit.*, hal. 126.

<sup>25)</sup>*Staatsblad* 1922 No. 216.

<sup>26)</sup>Periksa The Siauw Giap, "Urbanisatie Problemen in Indonesie", *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde* (115, 3, 1959), hal. 253-254.

<sup>27)</sup>Raden Nana Djaiasoempena, *Perkembangan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jawa Barat* (Bandung: Direktorat Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1974), hal. 17.

<sup>28)</sup>Tingkat urbanisasi adalah persentase jumlah penduduk perkotaan dibanding total penduduk (perkotaan dan pedesaan). Lihat Budhy Tjahjati S. dan Imron Bulkin, "Arahan Kebijakan Tata Ruang Nasional; Studi Kasus Jabotabek", *Prisma*, No. 2, Tahun XXII (Februari, 1994), hal. 21.

<sup>29)</sup>*Ibid.*

<sup>30)</sup>Lambert J. Giebel: "Jabotabek: An Indonesian-Dutch Concept on Metropolitan Planning of the Jakarta-Region", dalam Peter J.M. Nas (ed.), *op. cit.*, hal. 109.